

**ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA
PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI BADAN USAHA MILIK DESA
HAPSARI DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri



OLEH :

SHELLA SEPTIANI

NPM : 19.1.01.02.01.0037

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2024

Skripsi oleh:

SHELLA SEPTIANI

NPM : 19.1.02.01.0037

Judul:

**"ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN
DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM
PENCEGAHAN *FRAUD* DI BADAN USAHA MILIK DESA HAPSARI
DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN TAHUN 2023"**

Telah Disetujui untuk Diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: _____

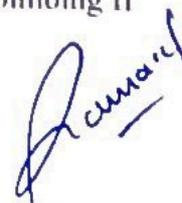
Pembimbing I



Dr. Amir Tohari, S.Si., M.Si.

NIDN. 0715078102

Pembimbing II



Badrus Zaman, M.Ak

NIDN. 0712046903

Skripsi oleh:

SHELLA SEPTIANI

NPM : 19102010037

Judul:

**"ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN
DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM
PENCEGAHAN *FRAUD* DI BADAN USAHA MILIK DESA HAPSARI
DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN TAHUN 2023"**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: _____

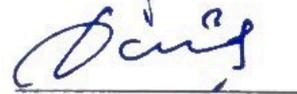
Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji :

1. Ketua : Dr. Amin Tohari, S.Si., M.Si.



2. Penguji I : Mar'atus Solikah, M.Ak.



3. Penguji II : Badrus Zaman, M.Ak



Dr. Amin Tohari, S.Si., M.Si.
NIDN. 0715078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Shella Septiani
Janis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 26 Maret 2000
NPM : 19102010037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis dan pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri,

Yang Menyatakan



SHELLA SEPTIANI
NPM: 19102010037

MOTTO

Terlambat bukan berarti gagal, tetapi terlambat adalah bagian dari proses yang membawa maksud didalamnya.

“ Bapak dan Ibu tidak bisa Memberimu Warisan Harta , Bapak Ibu Hanya bisa memberikan warisan ilmu lewat pendidikanMu”

~ Bapak & Ibu ~

ABSTRAK

Shella Septiani : Penerapan *Good Governance*, Transparasi, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban Dan Sumber Daya Manusia terhadap pencegaha *Fraud* Di Badan Usaha Milik Desa Hapsari Desa Mejono Kecamatan Plemahan Tahun 2023.

Kata kunci : *Good Governance*, Transparasi, Sumber Daya Manusia, *Fraud*.

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang tata kelola yang baik yang dilakukan Pengurus BUMDesa dengan tujuan pencegahan *Fraud* dengan menggunakan indikator Transparasi, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban Dan Sumber Daya Manusia yang ada pada BUMDesa Hapsari Desa Mejono Kecamatan Plemahan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Upaya dalam Pencegahan *Fraud* pada pengelolaan keuangan BUMDesa Hapsari dengan menggunakan prinsip *Good Governance* sebagai Penelitian yang dilakukan ini dengan menggunakan pendekatan Deskriptif dengan metode wawancara langsung terhadap setiap elemen yang ada di Desa Mejono.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Indikator Akuntabilitas, Pertanggung Jawaba, Serta Sumber Daya Manusianya sudah dapat dikatakan baik dalam melakukan pecegahan dari hasil wawancara yang dilakukan didapati bahwa indikator terebut mengarah ke tata kelola yang bak. Namun terdapat beberapa hal yang memang harus dibenahi oleh pengurus BUMDesa yaitu adalah Transparasi terhadap pengelolaan keuangan cara penyampaian kepada Masyarakatnya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga oleh karena kemurahanNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dengan ini perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Amin Tohari, S.Si., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang juga senantiasa memberi dukungan penuh kepada mahasiswa FEB dalam kegiatan perkuliahan.
2. Bapak Sigit Puji Winarko, S.E, S.Pd, M.Ak. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang senantiasa membimbing serta memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Akuntansi dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Amin Tohari, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing Satu yang selalu memberikan masukan, dorongan, dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh motivasi.
4. Bapak Barus Zaman selaku dosen pembimbing Dua yang selalu memberikan masukan, dorongan, dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh motivasi.
5. Kedua orang tua penulis Mama Rahel dan Bapak Rokani, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil dan juga doa yang begitu tulus.
6. Seseorang yang sudah bersabar menemani proses saya senantiasa Menjadi *Support System* terbaik, yang juga memberikan doa, dukungan, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Tidak lupa teman-temanku “Squad Bengkek, Keluarga KB”, terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan.
8. Tidak lupa teman-temanku semua, terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu disini, penulis ucapkan banyak terima kasih telah mendukung dan mendoakan yang terbaik.

Saya menyadari bahwa dalam proses penulisan ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, sehingga saya sebagai penulis mengharapkan adanya kritikan serta saran yang membangun untuk dapat menjadikan kesempurnaan proposal skripsi ini. Kiranya dengan proposal skripsi ini dapat memudahkan saya untuk menyusun skripsi yang akan datang.

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb

Kediri, 12 juli 2024

SHELLA SEPTIANI

NPM. 19102010037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN_PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Kehadiran Peneliti	35
C. Situs penelitian	35
D. Tahapan Penelitian	35
E. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38

G. Uji Keabsahan Penemuan.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Informan dan Deskripsi Situs Penelitian	41
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	50
C. Interpretasi dan Pembahasan	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Temuan.....	70
B. Implikasi.....	71
C. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Sumber Daya Alam.....	43
Tabel 4.2 Pendapatan Bumdesa Hapsari	48
Tabel 4.3 Tabel Interpretasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Peta Informasi Desa Mejono	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	78
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	81
Lampiran 3 Dokumentasi Observasi	83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah yang memanfaatkan potensial yang ada secara mandiri dengan berbagai macam kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, jasa maupun kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan secara gotong royong dengan masyarakat tergolong dalam kriteria UMKM yang dijalankan untuk membantu peningkatan perekonomian. Maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan tahapan perencanaan, mekanisme serta serangkaian proses yang menjamin keselarasan kegiatan desa serta kesejahteraan masyarakat (Saputra, 2020).

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) Kendati pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan atau organisasi apapun harus mampu merancang sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat menekankan aspek pengendalian atas reabilitas pelaporan keuangan guna memenuhi tanggung jawab suatu laporan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas operasional dalam pemakaian sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan.

Oleh karena itu sumber penerimaan negara yang merupakan dana publik harus dikelola secara baik dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan keuangan publik pemerintah pusat dilakukan dengan

melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, penganggaran, pembelanja, pelaksanaan, pelaporan pertanggung jawaban serta pengawasan terhadap penggunaan Keuangan Daerah (Tahun, 2019).

Terselenggaranya *Good Governance* (keperintahan yang baik) merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. *Good Governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka diwujudkannya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi., kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu segenap komunitas dalam negara menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu komunitas yang memberikan tekanan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya adalah Masyarakat.

Dengan demikian guna mencapai tujuan serta sasaran suatu organisasi haruslah dapat menyusun sistem pengendalian yang baik, sehingga dapat menekan angka tindak kecurangan yang akan terjadi atas laporan keuangan. Selain pengendalian terdapat juga faktor yang sangat penting yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yaitu

suatu tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *Good Governance*. Dengan menerapkan sistem kelola yang baik dengan berpedoman pada Pedoman Umum Good Governance Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006.

Good Governance ini memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki manfaat yang cukup membantu pada organisasi, salah satunya yaitu pada BUMDesa, dimana BUMDesa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimana pengelolaan ini yang akan memanfaatkan potensial desa secara mandiri dengan bermacam kegiatan ekonomi baik produksi, jasa maupun kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan secara gotong royong dengan masyarakat desa. BUMDesa tergolong dalam kriteria UMKM yang dijalankan guna membantu tingkat perekonomian masyarakat desa. Sehingga semakin baik tata kelola BUMDesa maka akan memberikan Kontribusi yang baik pula untuk Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa tersebut, maka akan berpengaruh juga terhadap tingkat kemajuan suatu Desa. Dengan begitu sangat penting penerapan *Good Governance* yang baik.

BUMDesa sebagai instansi publik harus dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk menjalankan amanah tersebut adalah dengan menjadi badan usaha yang terpercaya dengan melaksanakan tata kelola yang baik. Segala bentuk kegiatan terutama dalam pengelolaan dana harus memiliki pertanggungjawaban sebagai wujud tanggungjawab badan usaha.

Kecurangan akibat penyalahgunaan aset dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap akurasi laporan keuangan yang disampaikan oleh badan usaha.

Menurut Harjito, et.al (2016) ”Organisasi pelayanan masyarakat tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan tata kelola yang baik. Setiap organisasi memerlukan transparansi dan responsibilitas yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjaga kesinambungan jangka pendek dan jangka panjang”.

Berdasarkan informasi yang ada di Asosiasi BUMDesa di wilayah kecamatan Plemahan kabupaten Kediri terdapat beberapa BUMDesa yang terindikasi melakukan *fraud* atau biasa disebut dengan tindak kecurangan. Dalam kasus tersebut tindakan *fraud* ini dilakukan oleh seorang pengurus BUMDesa yang seharusnya bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keuangan BUMDesa tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kecurangan tersebut. Dalam tingkat pengelolaan dana BUMDesa yang paling penting adalah bagaimana tingkat pengendalian, pengelolaan, pengawasan dan pengorganisasian yang dilakukan semakin baik pengelolaan maka akan mengurangi terjadinya tindak kecurangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui pentingnya Sumber Daya Manusia, transparansi dan responsibilitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik bagi BUMDesa. Masyarakat luas juga diharapkan dapat

memahami tentang BUMDesa sebagai program baru Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi desa yang selama ini jarang diketahui oleh khalayak umum. Lebih lanjut, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai tata kelola yang baik dalam organisasi sebagai bentuk upaya dalam pencegahan *Fraud*.

Badan Usaha Milik Desa dengan nama “Hapsari” merupakan salah satu BUMDesa yang ada di kecamatan Plemahan lebih tepatnya di Desa mejono yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah dalam hal pembangunan, kemasyarakatan serta pemanfaatan potensi dan kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Desa Mejono ini merupakan salah satu desa yang berhasil mendirikan BUMDesa dengan dibantu oleh Pendamping Desa yang berasal dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi., perangkat desa dan juga dukungan masyarakat desa mejono. BUMDesa hapsari merupakan salah satu BUMDesa yang sudah mencapai predikat A baik dalam bidang simpan pinjam (BKD) maupun jasa wisata “Geronjong Wariti” yang diharapkan pengelolaan keuangannya dapat dilakukan dengan penerapan prinsip *good governance* sehingga dapat menjadi pencegah dalam terjadinya tindak kecurangan dan seluruh kegiatan transaksinya dapat dipertanggung jawabkan kepada public sebagai upaya pemerintah dalam penerapan prinsip *good governance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rowa dan Arthana (2019) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah Transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi dan kewajaran sangat berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di bank perkreditan rakyat di Kota Kupang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Candraningsih, et.al (2018) yang berjudul Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada BUMDesa Bulian Kecamatan Kubutambahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini mendapatkan hasil yaitu Pengelolaan BUMDesa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memngelolanya. Pemilihan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDesa. Latar belakang pendidikan Bagi pemegang jabatan bagian keuangan, bendahara, sekertaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau Diploma III bidang akuntansi atau sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa BUMDesa Dalam Pencegahan

Fraud Di Badan Usaha Milik Desa Hapsari Desa Mejono Kecamatan Plemahan Tahun 2023. Dengan demikian peneliti akan mengetahui pengelolaan seperti apa yang dilakukan oleh BUMDesa Hapsari dalam upaya pencegahan kecurangan.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini terlalu banyak permasalahan yang ada dalam ruang lingkup BUMDesa Hapsari yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis membatasi masalah yang ada atau hanya fokus yang berhubungan dengan : Analisis Governance Pada Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencegahan *Fraud* Di BUMDesa Hapsari Desa Mejono Kecamatan Plemahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana badan usaha milik desa BUMDesa “HAPSARI” Di Desa Mejono Kecamatan Plemahan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menjelaskan hasil dari penerapan *Good Governance* di BUMDesa “HAPSARI” dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan semestinya baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut merupakan beberapa manfaat yang dapat diambil :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tata kelola yang dilakukan oleh BUMDesa yang ada di kecamatan plemahan dalam upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru perihal tata kelola yang dilakukan oleh BUMDesa yang ada di kecamatan plemahan dalam upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana. Serta sebagai bahan informasi dan juga sebagai masukan bagi pengelola BUMDesa yang berada di kecamatan plemahan guna meningkatkan kualitas pengendalian, pengawasan serta pencegahan terhadap terjadinya kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2015). PENILAIAN INDEKS AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1).
- BPKP, L. dan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)). Modul 1 dari 5*. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Eka, G. F., & Priono, H. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN APBDES DI KECAMATAN PRAMBON. *Equilibrium*, 11(2).
- Harjito, Y., Wibowo, A. C., & Suhardjanto, D. (2016). Telaah kearifan lokal terhadap akuntabilitas lumbung desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 69– 90.
- Harun. (2009). *Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Muzdalifah, M. (2020). Pengaruh good corporate governance terhadap fraud pada perusahaan perbankan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 55–64.
- Najahningrum, F. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Universitas Negeri Semarang.
- Nawawi, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Keempat*. UGM Press.
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137.

- Saputra, D. N. (2020). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol. *Conference on Economic and Business Innovation*.
- Sari, N. M. L., & Mahyuni, L. P. (2020). Pencegahan Fraud pada LPD: Eksplorasi Implementasi Good Corporate Governance dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Urnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(3).
- Sudarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)* (Edisi Kedua). CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumitariani, N. K., & Adiputra, I. M. P. (2020). Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana BUMDes. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 167–175.
- Tahun, P. No. 12. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Thoyibatun, S. (2009). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Universitas Negeri Malang*.
- Wexley, Kenneth dan Gary, Y. (2003). *Organisasi dan Psikologi Personal*. Rineka Cipta.
- Wilopo. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Wolfe, D. T., dan D. R. H. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*., 38–42.